

Analisis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

H. M. Djumransjah

Abstract: This study was focused on educational costs in the Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN). The data were gathered in Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Malang I by using documents and interviews, and then analyzed by a reflective approach. The results indicated that the average cost was Rp.510,443.00 per-annum/student. The budget was spent on daily operation (40.46%), maintenance (28.98%), staff honoraria (28.31%), and teaching aids or educational media (2.07%). The fund comes from central government through developmental fund (DIP) and from Parent Association (BP3) through educational support (SPP), *infaq*, *zakat*, etc.

Kata kunci: biaya pendidikan, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

Analisis biaya penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk membandingkan data yang sejenis. Dalam analisis dapat pula dibandingkan data sasaran yang akan dicapai dengan data menurut kenyataan sebagai hasil pelaksanaan. Misalnya, dengan membandingkan rata-rata banyaknya siswa per ruang kelas dengan angka standar, akan dihasilkan tiga kelompok populasi, yaitu angkanya di atas standar, angkanya sama dengan standar, dan angkanya di bawah standar. Populasi yang mendapat angka berbeda, khususnya yang di bawah standar, dapat

H. M. Djumransjah adalah dosen Program Pascasarjana (PPS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang.

diangkat sebagai masalah untuk dicari penyebabnya (diagnosis), sekaligus dicari alternatif solusinya.

Analisis biaya penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan tujuan menemukan kemungkinan tidak seimbang alokasi sumber pendidikan bagi berbagai tingkat dan jenis pendidikan atau tidak seimbang alokasi sumber antara daerah yang satu dengan yang lain, untuk meneliti faktor-faktor penting atau turut mempengaruhi pengeluaran biaya pendidikan secara tepat, dan mendapatkan alat yang dapat dipakai dalam mengadakan perkiraan pembiayaan bagi pengelolaan pendidikan yang sedang atau akan disusun (John dkk., 1983; Suharto, 1991). Dengan alat ini biaya yang diajukan benar-benar wajar dan tidak melebihi keperluan seharusnya. Untuk itu, selalu diadakan seleksi atas sejumlah kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang tidak mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. Upaya demikian merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen pendidikan (Pidarta, 1992).

Menurut Kamars (1989), butir-butir biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan sekolah/madrasah meliputi gaji dan honorarium, buku teks, bahan-bahan/perlengkapan dan perawatan, dan kontribusi siswa. Pos pengeluaran yang pertama untuk membayar pegawai dan tenaga kependidikan tetap seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan struktural/fungsional. Pengeluaran lain sebagai honorarium dikeluarkan untuk guru yang bertugas mengajar lebih dari jam wajib dan juga untuk guru tidak tetap atau honorer. Pos pengeluaran yang kedua digunakan untuk pembelian buku teks bagi siswa per tahun minimal sejumlah 12 buku. Pos pengeluaran ketiga dipergunakan untuk pembelian antara lain bahan dan alat pengajaran yang dipergunakan guru, buku teks guru, kapur tulis, kertas, formulir, dan lain-lain. Biaya untuk perawatan mencakup air, listrik, telepon, perbaikan alat yang rusak, dan menjaga sarana sekolah/madrasah supaya tetap baik. Pengeluaran pos keempat digunakan untuk kontribusi siswa, maksudnya pengeluaran siswa dalam bentuk biaya transpor sekolah-rumah, baju seragam, pakaian pramuka, pakaian olah raga, buku catatan, dan lain-lain (Kamars, 1989; Budiono, 1997).

Jumlah biaya ini tergantung pada lokasi, program, dan kebutuhan riil setiap madrasah. Dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan agar pelaksanaannya berjalan lebih lancar bersifat relatif. Menurut Budiono (1997), pengeluaran biaya pendidikan tiap siswa untuk SD, SLTP, dan SLTA di masing-masing propinsi berbeda. Biaya untuk Jakarta Raya,

Jawa Barat, dan Bali jauh lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran tiap siswa untuk pendidikan nasional. Di SD ternyata pengeluaran tiap siswa untuk pendidikan di Riau juga lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran tiap siswa secara nasional. Di Kalimantan Timur pengeluaran tiap siswa untuk pendidikan SD dan SLTP juga lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran tiap siswa secara nasional.

Menurut analisis Kamars (1989), pada 1985 *unit cost* siswa SMP sebesar Rp134.396,-. Secara mengejutkan, pada tahun yang sama *unit cost* siswa Madrasah Tsanawiyah per tahun sejumlah Rp136.690,-, lebih tinggi Rp2.294,- dari SMP. Pada 1992, pengeluaran biaya pendidikan untuk siswa SMP sebesar Rp147.098,- (Budiono, 1997), sedang pengeluaran untuk siswa Madrasah Tsanawiyah, meskipun tidak ada data yang jelas, diperkirakan sejumlah tersebut. *Unit cost* ini setiap tahun bertambah sehingga selama 14 tahun (1985-1999) diperkirakan pertumbuhannya sebesar 300%. Pertambahan ini secara nominal cukup menggembirakan karena jumlahnya semakin banyak. Namun secara riil pertambahan ini tidak banyak memberi makna substansial, karena nilai uang semakin merosot yang berakibat daya tukarnya semakin rendah.

Keberhasilan lembaga pendidikan madrasah dapat diketahui melalui parameter kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Enoch, 1992; Soedomo, 1995). Dengan menggunakan parameter ini, madrasah diharapkan semakin kompetitif dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa bersama-sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Sekarang ini ada kesan positif yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap madrasah bahwa prestasi siswa yang tinggi akan dapat dicapai apabila didukung oleh biaya pendidikan yang memadai. Kesan ini menjadikan masyarakat rela berkorban secara moral dan material demi keberhasilan madrasah. Dengan kata lain, masyarakat rela berkorban kalau madrasah mampu memberi jaminan kualitas yang membanggakan dan menjanjikan masa depan yang cerah (Fadjar, 1995).

Secara kualitatif dan kuantitatif madrasah di Jawa Timur, khususnya di Malang, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya siswa setiap tahun yang rata-rata sekitar 7% dan banyaknya prestasi akademis yang diraih oleh peserta didik dari madrasah tersebut baik di tingkat lokal, regional bahkan nasional (Djumransjah, 1999). Peningkatan madrasah tersebut ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Secara eksternal per-

hatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah sangat besar, termasuk dalam bentuk finansial dan bantuan pemikiran dalam pengembangan kelembagaan. Secara internal, peningkatan dan keberhasilan prestasi yang dicapai oleh madrasah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pengajar yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dan biaya yang mencukupi. Faktor terakhir ini sering menjadi komponen yang signifikan dalam pengembangan madrasah. Akibatnya, banyak pengelola madrasah yang secara serius berusaha menghimpun dana/biaya sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak demi kemajuan madrasah.

Berdasarkan observasi awal pada beberapa madrasah, ditemukan bahwa belum ada keseimbangan antara satu mata anggaran dengan mata anggaran lainnya yang diterima oleh madrasah sebagai penyelenggara operasional pendidikan, sehingga pengelola madrasah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan riil madrasah. Menyadari betapa pentingnya biaya penyelenggaraan pendidikan pada madrasah persiswa dalam rangka ketepatan penyusunan perencanaan pendidikan dan program-program dalam peningkatan mutu madrasah dalam bentuk pengalokasian dana atau biaya yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, ataupun dana yang dapat dikembangkan dari masyarakat atau orang tua siswa melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), perlu diadakan penelitian tentang biaya penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, khususnya madrasah pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah).

Sampai sekarang, belum ada catatan resmi sebagai hasil penelitian mengenai jumlah biaya penyelenggaraan pendidikan madrasah, sehingga belum diketahui pula jumlah *unit cost* siswa per tahun. Untuk itu, penelitian ini sangat penting dilakukan. Berdasarkan data madrasah pada Kantor Departemen Agama Kota Malang, jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Malang sebanyak 42 buah, terdiri atas 40 MI Swasta dan 2 MI Negeri (MIN), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 22 buah, terdiri atas 20 MTs Swasta dan 2 MTs Negeri (Kandepag Kodya Malang, 1999). Di antara sejumlah madrasah tersebut, dipilih Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Malang I sebagai objek penelitian, dengan pertimbangan madrasah ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan baik kualitas maupun kuantitas, madrasah ini relatif bagus dalam pengelolaan biaya penyelenggaraan pendidikan (*amanah*), dan madrasah ini cukup berhasil dalam menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dana yang tersedia di MTsN dalam mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, mendeskripsikan dana yang tersedia di MTsN yang digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk penyelenggaraan pendidikan, dan mengidentifikasi permasalahan dan sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan dan yang mungkin dapat dikembangkan di MTsN.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan di MTsN. Untuk itu, penelitian tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, mengetes hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi yang lebih luas (Sax, 1968; PPIPT, 1982/1983). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Wawancara ditujukan kepada pengelola madrasah (Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, dan Kepala Sub bagian Tata Usaha) yang dilengkapi format isian sebagai kuesioner untuk dijawab dan telah disediakan oleh peneliti.

Jenis data yang dikumpulkan berhubungan dengan biaya penyelenggaraan MTsN Malang I baik secara keseluruhan maupun dari tiap-tiap komponen (Djumransjah, 1990; Suharto, 1991). Data yang terkumpul kemudian diolah dengan disusun dalam tabel-tabel dan dipersentase untuk memperoleh rata-rata biaya penyelenggaraan pendidikan di madrasah per siswa per tahun.

HASIL

Temuan penelitian ini dapat dilihat ringkasannya pada Tabel 1. Pengeluaran untuk biaya kantor hampir setengah pengeluaran (40,64%), dan kemudian untuk honorarium sebanyak 28,31%. Pengeluaran untuk pemeliharaan 14,7% dan serba-serbi 14,26%. Pengeluaran yang sangat kecil adalah untuk alat-alat pelajaran 2,07%. Di samping itu juga dapat diketahui bahwa jumlah biaya tidak termasuk honorarium rata-rata biaya penyelenggaraan per siswa per tahun hanya sebesar Rp87.274,20 sedangkan termasuk honorarium sebesar Rp121.734,58. Biaya penyelenggaraan termasuk gaji dan honorarium rata-rata per siswa per tahun menjadi Rp510.442,-. Jumlah ter-

akhir ini kalau dibandingkan dengan *unit cost* murid Madrasah Tsanawiyah tahun 1985 yang berjumlah Rp136.690,- selama hampir 14 tahun (1985-1999) mengalami kenaikan sebanyak kurang lebih 370%. Kenaikan sejumlah ini bukan berarti nilai barang yang dihasilkan bertambah, akan tetapi mungkin sama atau bahkan berkurang, karena adanya devaluasi dan inflasi yang membubung tinggi. Untuk itu, kenaikan ini tidak memberikan makna yang signifikan bagi pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 1 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di MTsN Malang I Tahun Ajaran 1998/1999

No.	Macam Pengeluaran	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Rp)	Biaya Per Siswa Per Tahun (Rp)	%
1.	Biaya kantor	39.335.000	49.477,98	40,64
2.	Pemeliharaan	14.248.000	17.922,01	14,72
3.	Alat pelajaran	2.000.000	2.515,72	2,07
4.	Serba-serbi	13.800.000	17.358,49	14,26
	Jumlah biaya di luar honorarium	69.383.000	87.274,20	
5.	Honorarium	27.396.000	34.460,38	28,31
	Jumlah biaya termasuk honorarium	96.779.000	121.734,58	
6.	Gaji	309.023.000	388.708,18	
	Jumlah biaya termasuk gaji & honorarium	405.802.000	510.442,76	
7.	Bangunan baru	290.000.000	364.779,87	
	Total biaya penyelenggaraan pendidikan	695.802.000	875.222,64	

Perhitungan tersebut merupakan hasil kompilasi data dari kuesioner yang diisi oleh para responden. Dari sini dapat diketahui biaya penambahan dengan adanya bangunan baru dari proyek Pemerintah Pusat dan partisipasi masyarakat melalui BP3, sehingga biaya penyelenggaraan pendidikan rata-rata per siswa per tahun menjadi Rp875.222,64.

Berikut ini adalah sumber biaya yang diperoleh madrasah dengan jumlah siswa sebanyak 795 orang, sebanyak 23 orang siswa di antaranya

dibebaskan dari SPP setelah memperhatikan beberapa pertimbangan tentang keadaan siswa tersebut, dan juga terdapat 50 orang siswa mendapatkan beasiswa. Berdasarkan data yang terkumpul dapat diketahui bahwa rata-rata besarnya sumber biaya bagi suatu madrasah adalah Rp486.514,50 per siswa per tahun (tidak termasuk gaji) atau sebesar Rp386.779.000,- sebagaimana yang diterima Madrasah Tsanawiyah Negeri pada saat penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 1998/1999. Jika dihitung per siswa per tahun termasuk gaji, maka rata-rata Rp875.222,60 dan secara kelembagaan sebesar Rp895.802.000,- (sudah termasuk gaji). Besarnya dana baik dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat melalui orang tua siswa (dana SPP/BP3) per bulan Rp7.300,- bagi 795 siswa dan 23 orang di antaranya bebas SPP dan 50 orang mendapatkan beasiswa dari MTsN.

Di samping dana SPP, madrasah juga mendapatkan bantuan uang gedung dari siswa baru masing-masing Rp100.000,-. Atas kesepakatan pimpinan madrasah bersama para guru dan BP3, setiap siswa diharapkan bantuannya melalui infaq dan zakat dalam satu tahun sebesar Rp10.000,-. Semua dana tersebut digunakan untuk program pendidikan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik sehingga madrasah berkembang seperti sekarang ini.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa biaya pendidikan pada madrasah yang berasal dari pemerintah masih cukup besar, baik yang tidak termasuk gaji (84%) maupun termasuk gaji (90%). Sumber dana dari orang tua siswa yang berjumlah 795 orang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan tidak termasuk gaji pegawai honorer dan tunjangan guru dan pegawai honorer sebesar Rp62.066.000,- dan jika termasuk gaji bukan pegawai sebesar Rp69.566.000,-. Dana SPP siswa saja dalam satu tahun untuk 772 siswa (belum termasuk 23 orang siswa bebas SPP) dapat dikumpulkan sejumlah Rp67.627.000,-. Uang infaq dan zakat dalam satu tahun kurang lebih sejumlah Rp7.950.000,- dan dana dari masyarakat dapat dikumpulkan kurang lebih Rp75.577.200,-. Dana yang digunakan untuk beasiswa dan lain-lain lebih dari Rp13.511.200,-. Belum lagi terhitung dari penerimaan melalui siswa baru untuk uang gedung Rp100.000,- tiap siswa.

Beban dan pendapatan guru madrasah pada tahun ajaran 1998/1999 adalah untuk guru tetap (GT) rata-rata beban mengajarnya 16 jam per minggu. Beban mengajar terbanyak dari GT adalah antara 18-19 jam per minggu dengan jumlah guru sebanyak 12 orang. Sedangkan beban mengajar

antara 12-14 jam sebanyak 3 orang guru. Ada pula guru yang jam mengajarnya masing-masing 24, 30, dan 35 jam per minggu. Sisanya di bawah 10 jam per minggu. Guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Ekonomi Koperasi, IPS, Sejarah dan Geografi, dan MIPA diberi beban mengajar yang lebih, karena keterbatasan guru dalam bidang mata pelajaran tersebut, baik untuk guru GT maupun guru tidak tetap (GTT). Karena terbatasnya pengangkatan guru baru sesuai yang diperlukan, Kepala Madrasah berusaha mengangkat guru tidak tetap, sehingga sebagian dana pendidikan dipergunakan untuk membayar honorarium GTT yang sedianya dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak kurang juga manfaatnya.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk gaji dan honorarium rata-rata per siswa per tahun menjadi Rp510.442,-. Jumlah terakhir ini kalau dibandingkan dengan *unit cost* siswa Madrasah Tsanawiyah tahun 1985 yang berjumlah Rp136.690,- (Kamars, 1989) telah mengalami kenaikan sebanyak kurang lebih 370%. Kenaikan sejumlah ini bukan berarti nilai barang yang dihasilkan bertambah, akan tetapi mungkin sama atau bahkan berkurang, karena adanya devaluasi dan inflasi yang membumbung tinggi. Apalagi jika dihitung dengan dolar US, maka kenaikannya hampir 11 kali (1100 %). Pada tahun 1985 kurs rupiah terhadap dolar US sekitar Rp900,-/US\$, sedang pada 1999 sekitar Rp10.000,-/US\$. Untuk itu, kenaikan ini tidak memberikan makna yang signifikan bagi pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Kenaikan ini juga terjadi di berbagai negara, misalnya Korea Selatan tahun 1970 dan 1989 (19 tahun) mengalami kenaikan sebesar 355%. Di Meksiko dan Kenya kenaikannya sebesar 13% selama 15 tahun antara tahun 1970 dan 1985 (Budiono, 1997; Birdstall & Sabot, 1993). Kenaikan biaya penyelenggaraan pendidikan ini merupakan gejala global, karena banyak negara menganggap bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang signifikan bagi pembangunan suatu negara secara menyeluruh.

Hasil kompilasi data dari berbagai sumber di madrasah menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan rata-rata per siswa per tahun pada tahun 1998/1999 sebanyak Rp875.222,64. Secara operasional, biaya ini digunakan untuk modal dan penyelenggaraan pendidikan madrasah.

Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan prasarana pendidikan yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu atau beberapa tahun, baik fisik maupun nonfisik. Data tentang sumber biaya tersebut diperoleh dari dokumen yang pelaksanaannya ditangani oleh bagian keuangan/bendaharawan dan/atau Kepala Tata Usaha.

Berdasarkan temuan penelitian, rata-rata besarnya sumber biaya bagi suatu madrasah adalah Rp486.514,50 per siswa per tahun (tidak termasuk gaji) atau dengan jumlah siswa sebanyak 795 anak sebesar Rp386.779.000,- sebagaimana yang diterima MTsN Malang I pada saat penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 1998/1999. Jika dihitung per siswa per tahun termasuk gaji, maka secara kelembagaan biayanya sebesar Rp895.802.000,-.

Walaupun madrasah tersebut berstatus negeri, berkat pendekatan pimpinan madrasah bersama para guru, para orang tua siswa, dan masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kepedulian ini semata-mata tidak bersifat finansial, tetapi juga pemikiran dan bahkan partisipasi aksi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Kepercayaan yang begitu besar kepada madrasah tersebut dikarenakan lembaga ini selalu mengembangkan manajemen yang terbuka dan penggunaan dananya efektif dan efisien, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kepercayaan ini harus tetap dijaga dengan memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran secara maksimal, karena kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam era reformasi ini sangat signifikan dalam menentukan proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran (Budiono, 1997).

Dari pengamatan peneliti, dana yang berasal baik dari bantuan pemerintah pusat maupun partisipasi orang tua dan masyarakat masih belum dapat mengimbangi tingkat kebutuhan madrasah dan daya tampung siswa karena banyaknya masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke madrasah tersebut, yang setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 7% (Djumransjah, 1999). Untuk itu, upaya kreatif dari pengelola madrasah dalam menggali dana dari berbagai sumber sangat diharapkan sebagai alternatif solusi dari keterbatasan dana yang tersedia di madrasah.

Beban mengajar guru madrasah pada tahun ajaran 1998/1999 adalah untuk guru tetap (GT) rata-rata 16 jam per minggu dan guru tidak tetap sebanyak 26 jam per minggu. Guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Ekonomi Koperasi, IPS, Sejarah dan

Geografi, dan MIPA diberi beban yang lebih karena keterbatasan guru dalam bidang mata pelajaran tersebut baik untuk guru GT maupun guru tidak tetap (GTT). Apabila beban mengajar guru tersebut dapat dipertahankan sebanyak 16 jam per minggu pada setiap semester, maka profesionalisme mengajar guru semakin mantap, karena beban mengajar guru sangat berhubungan dengan profesionalisme guru. Guru yang terbebani jam mengajar yang banyak, misalnya 25 jam per minggu, seringkali mengalami kelelahan bahkan kejenuhan dalam mengajar. Kejenuhan ini menjadikan guru hanya sekadar memenuhi tugas, tanpa apresiasi, dan variasi yang dapat membangun gairah belajar siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Padahal kemenarikan pembelajaran merupakan salah satu indikator keberhasilan pembelajaran, di samping keefektifan dan efisiensi. Di samping itu, beban mengajar yang banyak menjadikan mereka tidak mempunyai waktu untuk belajar atau menggali informasi yang lebih luas karena waktu mereka habis digunakan untuk mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan mereka ajarkan. Akibatnya, pembelajaran bersifat tekstual, kering, dan membosankan, sehingga semangat belajar siswa mengalami penurunan. Untuk itu, pemberian beban jam mengajar bagi guru harus melalui pertimbangan yang matang, tidak semata-mata memenuhi jam mengajar yang tersedia di madrasah (Maimun, 1999).

Menurut konsep model kuantitatif sistem pendidikan di Indonesia, rasio rata-rata guru dan siswa yang diharapkan adalah 1:14 (Kamars, 1989). MTsN Malang I yang memiliki guru tetap 23 dengan jumlah siswa sebanyak 795 anak mencapai rasio guru dan siswa 1:35. Rasio ini jauh di bawah ideal. Rasio ini jika ditambah dengan guru tidak tetap yang sebanyak 12 orang adalah 1:23. Jumlah ini pun masih jauh di bawah ideal. Untuk itu, usulan kepada pemerintah untuk penambahan guru tetap harus selalu dilakukan, di samping juga menambah guru tidak tetap, selama tidak membebani biaya penyelenggaraan madrasah. Dengan ini diharapkan rasio ideal guru dan siswa semakin mendekati kenyataan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata biaya penyelenggaraan pendidikan pada MTsN Malang I per siswa per tahun pada tahun ajaran 1998/1999 adalah Rp121.735,- sudah termasuk honorarium. Jika tidak termasuk honorarium, biaya per

siswa sebesar Rp87.274,- dan jika termasuk gaji dan honorarium biaya per siswa sebesar Rp510.443,-. Dana pendidikan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan meliputi untuk biaya kantor 40,64%, pemeliharaan dan serba-serbi masing-masing 14,72% dan 14,26%. Untuk honorarium sebesar 28,31% dan alat-alat pelajaran 2,07%. Dana penyelenggaraan pendidikan di MTsN Malang I berasal dari pemerintah pusat dan orang tua yang terdiri atas uang SPP, Infaq, zakat, dan uang gedung dari siswa baru.

Saran

Sebagian besar biaya penyelenggaraan pendidikan di MTsN berasal dari pemerintah. Di masa mendatang pengelola MTsN perlu lebih intensif memobilisasikan dana dari orang tua siswa atau pihak ketiga yang menguntungkan praktik kependidikan di madrasah itu, baik dalam bentuk uang SPP, infaq, dan zakat maupun uang sumbangan pembangunan gedung dan sponsorship.

DAFTAR RUJUKAN

- Birdstall, N. & Sabot, R.H. 1993. *Virtuous Circle: Human Capital Growth and Equality in Asia*. Washington DC: The East Asian Miracle, World Bank, Policy Research Department.
- Budiono 1997. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Djumransjah, H.M. 1999. *Pemetaan Madrasah di Kota Madya Malang*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Malang: STAIN Malang.
- Enoch, Y. 1992. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadjar, H.A.M 1995. *Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang, 29 Juli 1995.
- John, R.L., Morphet, E.D. & Alexander, K. 1983. *The Economics and Financing of Education*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Kamars, H.M.D. 1989. *Sistem Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi: Suatu Studi Perbandingan Antar Beberapa Negara*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud.
- Kandepag Kodya Malang. 1999. *Data Madrasah di Kota Malang*. Malang: Kandepag Kodya Malang.
- Maimun, A. 1999. *Pengembangan Strategi Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah*. Makalah Pelatihan Manajemen Madrasah bagi Kepala Madrasah se-Jawa Timur, di Batu Malang, 15-17 November 1999.

- Pidarta, M. 1992. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- PPIPT. 1982/1983. *Metodologi Penelitian, Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Sax, G. 1968. *Empirical Foundations of Educational Research*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Soedomo, M. 1995. *Peningkatan Kualitas Sistem Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional (Antisipasi Kecenderungan Peran Serta Masyarakat)*. Malang: FT Unisma.
- Soeharto, B. 1991. *Perencanaan Sosial (Kasus Pendidikan)*. Bandung: Armico.